



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 118 /PMK.07/2010**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PENGUATAN DESENTRALISASI
FISKAL DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka penetapan alokasi Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2010 untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5132);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.07/2010.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MENETAPKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PENGUATAN DESENTRALISASI FISKAL DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

- (1) Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF dan PPD) yang dialokasikan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah bagian dari Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2010 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010.
- (2) Alokasi DPDF dan PPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp7.100.000.000.000,00 (tujuh triliun seratus miliar rupiah).
- (3) DPDF dan PPD digunakan untuk membantu mendukung penguatan desentralisasi fiskal dan untuk percepatan pembangunan daerah melalui penyediaan dan pengembangan bidang infrastruktur, dan non infrastruktur, serta sarana pendukung lainnya yang menjadi urusan daerah.

Pasal 2

- (1) Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menerima DPDF dan PPD beserta besaran alokasinya ditetapkan dalam rapat Panitia Kerja Belanja Negara atau Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Rincian daerah penerima dan besaran alokasi DPDF dan PPD untuk masing-masing bidang adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Alokasi DPDF dan PPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah pengeluaran setinggi-tingginya yang diperbolehkan untuk setiap bidang.

Pasal 3

- (1) Daerah wajib menggunakan DPDF dan PPD sesuai dengan bidang sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Daerah yang menerima alokasi DPDF dan PPD tidak diperbolehkan melakukan pergeseran alokasi antar bidang.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

DPDF dan PPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bagian dari Pendapatan Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010 atau APBD Perubahan Tahun Anggaran 2010.

Pasal 5

Kegiatan yang tidak dapat didanai dari DPDF dan PPD meliputi:

- a. dana pendamping Dana Alokasi Khusus;
- b. sewa (contoh: gedung kantor, kendaraan operasional);
- c. administrasi kegiatan (contoh: gaji, honor, lembur, alat tulis kantor);
- d. penelitian;
- e. pelatihan; dan
- f. perjalanan dinas pegawai daerah.

Pasal 6

- (1) Penyaluran DPDF dan PPD Tahun 2010 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran DPDF dan PPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 45% (empat puluh lima persen);
 - b. Tahap II sebesar 45% (empat puluh lima persen); dan
 - c. Tahap III sebesar 10% (sepuluh lima persen).
- (3) Penyaluran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus.
- (4) Penyaluran Tahap I dilaksanakan setelah daerah penerima menyampaikan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2010 dengan melampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan dan Jadwal Rencana Penyelesaian Kegiatan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (5) Surat Pernyataan Kesanggupan dan Jadwal Rencana Penyelesaian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing disusun sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II dan Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (6) Surat Pernyataan Kesanggupan dan Jadwal Rencana Penyelesaian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterima paling lambat tanggal 31 Juli 2010.
- (7) Penyaluran Tahap II dan Tahap III dapat dilaksanakan setelah laporan penyerapan penggunaan DPDF dan PPD tahap sebelumnya diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (8) Laporan penyerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 7

- (1) Laporan penyerapan penggunaan DPDF dan PPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) disampaikan setelah penggunaan dana telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Laporan penyerapan penggunaan DPDF dan PPD Tahap I atau Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7), diterima paling lambat tanggal 15 Desember 2010.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai DPDF dan PPD harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember 2010.
- (2) Hasil dari kegiatan yang didanai DPDF dan PPD sudah dapat dimanfaatkan pada akhir Tahun Anggaran 2010.

Pasal 9

- (1) Daerah penerima DPDF dan PPD melakukan optimalisasi penggunaan atas besaran dana yang diterimanya.
- (2) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk bidang yang sama.

Pasal 10

Pengawasan fungsional/pemeriksaan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan DPDF dan PPD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 11

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2010

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 285

Salinan sesuai dengan aslinya,

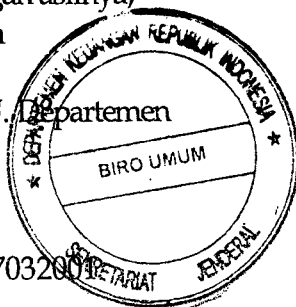
Kepala Biro Umum

u.b.

Pj. Kepala Bagian T.U. Departemen

Adelina Sirait

NIP 196606031987032001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 118 /PMK.07/2010 TENTANG
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI
DANA PENGUATAN DESENTRALISASI
FISKAL DAN PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2010

NO	NAMA DAERAH	BIDANG											JUMLAH	
		INFRASTRUKTUR			KESEHATAN	PERTANIAN/ PERKEBUNGAN	PERHUBUNGAN/ TRANSPORTASI	PERDAGANGAN	PRASARANA PEMERINTAH DAERAH	SARANA DAN PRASARANA PEDESAAN	PASAR (termasuk pasar tradisional)	KELAUATAN DAN PERIKANAN (termasuk reklamasi pantai)		LINGKUNGAN HIDUP
		JALAN DAN JEMBATAN	IRIGASI/ NORMALISASI SUNGAI/ ALTAU/ PANTAI	AIR BERSIH										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,517,959,132.00
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	34,517,959,132.00	-	-	3,944,909,615.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,944,909,615.00
2	Kab. Aceh Singkil	-	-	-	-	-	-	24,655,685,094.00	-	-	-	-	-	24,655,685,094.00
3	Kab. Bireun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,384,472,558.00
4	Kota Banda Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,517,959,132.00
5	Kab. Langsa	24,384,472,558.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,517,959,132.00
6	Kab. Aceh Tenggara	19,724,548,075.00	14,793,411,056.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,793,411,056.00
7	Kab. Aceh Barat	34,517,959,132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,729,133,338.00
8	Kab. Gayo Lues	-	-	-	14,793,411,056.00	-	-	-	-	-	-	-	-	24,655,685,094.00
9	Kab. Subulussalam	9,729,133,338.00	-	-	-	-	-	14,793,411,056.00	-	-	-	-	-	34,517,959,132.00
10	Kab. Pidie Jaya	9,862,274,038.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,517,959,132.00
11	Kab. Bener Meriah	34,517,959,132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,944,909,615.00
12	Kab. Aceh Jaya	34,517,959,132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,972,454,808.00
13	Kab. Nagan Raya	-	-	-	3,944,909,615.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,931,137,019.00
14	Kota Sabang	-	-	-	1,972,454,808.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,862,274,038.00
15	Kab. Aceh Utara	4,931,137,019.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,697,002,883.00
16	Kab. Labuhan Batu	9,862,274,038.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,862,274,038.00
17	Kab. Mandailing Natal	14,793,411,056.00	-	-	-	4,931,137,019.00	-	1,972,454,808.00	-	-	-	-	-	34,517,959,132.00
18	Kab. Nias	-	-	-	9,862,274,038.00	-	-	-	-	-	-	-	-	34,517,959,132.00
19	Kab. Simalungun	34,517,959,132.00	-	-	-	-	-	-	-	24,655,685,094.00	-	-	-	34,517,959,132.00
20	Kab. Tapanuli Selatan	9,862,274,038.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,052,390,622.00
21	Kab. Tapanuli Utara	19,724,548,075.00	-	-	14,793,411,056.00	-	-	-	-	-	-	-	-	34,517,959,132.00
22	Kab. Toba Samosir	32,052,390,622.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,931,137,019.00
23	Kab. Pematang Siantar	34,517,959,132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,889,819,230.00
24	Kota Padang Sidempuan	-	-	-	4,931,137,019.00	-	-	-	-	-	-	-	-	34,517,959,132.00
25	Kab. Humbang Hasundutan	7,889,819,230.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,655,685,094.00
26	Kab. Serdang Bedagai	34,517,959,132.00	-	-	-	-	-	-	-	9,862,274,038.00	-	-	-	9,862,274,038.00
27	Kab. Samosir	19,724,548,075.00	4,931,137,019.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,449,096,141.00
28	Kab. Nias Barat	5,917,364,423.00	-	-	-	-	-	-	3,944,909,615.00	-	-	-	-	9,862,274,038.00
29	Kab. Dairi	-	-	9,862,274,038.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,793,411,056.00
30	Provinsi Sumatera Barat	39,449,096,141.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,793,411,056.00
31	Kab. Padang Pariaman	-	-	-	14,793,411,056.00	-	-	-	-	-	-	-	-	29,586,822,113.00
32	Kab. Sawahlunto	14,793,411,056.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,517,959,132.00
33	Kab. Dharmasraya	29,586,822,113.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,655,685,094.00
34	Kab. Pesisir Selatan	24,655,685,094.00	-	-	9,862,274,038.00	-	-	-	-	-	-	-	-	29,586,822,113.00
35	Kota Padang	9,862,274,038.00	4,931,137,019.00	4,931,137,019.00	-	4,931,137,019.00	-	-	-	-	-	-	-	24,655,685,094.00
36	Kab. Sijunjung	29,586,822,113.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,724,548,075.00
37	Kab. Limapuluh Kota	19,724,548,075.00	4,931,137,019.00	-	-	-	-	-	19,724,548,075.00	-	-	-	-	4,931,137,019.00
38	Kab. Solok Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	4,931,137,019.00	-	-	-	19,724,548,075.00
39	Kab. Kampar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,024,845,430.00
40	Kab. Bengkalis	19,724,548,075.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,931,137,019.00
41	Kab. Lingga	34,024,845,430.00	-	-	-	-	-	-	4,931,137,019.00	-	-	-	-	19,724,548,075.00
42	Kab. Bintan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,862,274,038.00
43	Provinsi Jambi	-	-	-	-	19,724,548,075.00	-	-	-	-	-	-	-	12,327,842,547.00
44	Kab. Tanjung Jabung Barat	9,862,274,038.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,396,705,528.00
45	Kab. Tanjung Jabung Timur	4,931,137,019.00	-	-	7,396,705,528.00	-	-	-	-	-	-	-	-	24,384,472,558.00
46	Kab. Tebo	-	-	-	7,396,705,528.00	-	-	-	-	-	-	-	-	17,258,979,566.00
47	Kab. Kerinci	24,384,472,558.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,793,411,056.00
48	Kab. Muaro Jambi	4,931,137,019.00	-	-	12,327,842,547.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,917,364,423.00
49	Kab. Bungo	14,793,411,056.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,476,641,342.00
50	Kab. Batanghari	-	-	-	5,917,364,423.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33,531,731,728.00
51	Provinsi Sumatera Selatan	37,476,641,342.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,517,959,132.00
52	Kab. Lahat	27,614,367,305.00	-	-	5,917,364,423.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,876,046,634.00
53	Kab. Musi Banyuasin	-	9,862,274,038.00	4,931,137,019.00	-	-	19,724,548,075.00	-	-	-	-	-	-	14,793,411,056.00
54	Kab. Muara Enim	-	-	4,931,137,019.00	-	-	3,944,909,615.00	-	-	-	-	-	-	29,586,822,113.00
55	Kota Lubuk Linggau	9,862,274,038.00	-	-	4,931,137,019.00	-	-	-	-	-	-	-	-	34,517,959,132.00
56	Kab. Banyuasin	29,586,822,113.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,655,685,094.00
57	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	-	9,862,274,038.00	-	-	-	24,655,685,094.00	-	-	-	-	-	-	24,655,685,094.00
58	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	14,793,411,056.00	9,862,274,038.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,655,685,094.00

(Rupiah)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

(Rupiah)

NO	NAMA DAERAH	BIDANG											JUMLAH				
		JALAN DAN JEMBATAN	IRIGASI/ NORMALISASI SUNGAI ATAU PANTAI	AIR BERSIH	KESEHATAN	PERTANIAN/ PERKEBUNAN	PERHUBUNGAN/ TRANSPORTASI	PERDAGANGAN	PRASARANA PEMERINTAH DAERAH	SARANA DAN PRASARANA PEDESAAN	PASAR (termasuk pasar tradisional)	KELAUTAN DAN PERIKANAN (termasuk reklamasi pantai)		LINGKUNGAN HIDUP			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Kab. Ogan Komering Ulu	34,517,959,132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,517,959,132.00
60	Kab. Prabumulih	34,517,959,132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,517,959,132.00
61	Provinsi Bengkulu	37,082,150,381.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,082,150,381.00
62	Kab. Bengkulu Utara	25,148,798,796.00	-	-	4,931,137,019.00	-	-	-	-	-	-	-	4,438,023,317.00	-	-	-	34,517,959,132.00
63	Kab. Rejang Lebong	-	-	-	29,586,822,112.00	4,931,137,019.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,517,959,132.00
64	Kota Bengkulu	19,724,548,075.00	9,862,274,038.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,517,959,132.00
65	Kab. Mukomuko	21,470,170,580.00	-	-	12,623,710,768.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,093,881,348.00
66	Kab. Kepahiang	29,236,711,384.00	-	-	4,857,169,964.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,093,881,348.00
67	Kab. Bengkulu Tengah	14,793,411,056.00	-	9,862,274,038.00	7,396,705,528.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,052,390,622.00
68	Kab. Lebong	24,655,685,094.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,655,685,094.00
69	Kab. Kaur	9,862,274,038.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,862,274,038.00
70	Bengkulu Selatan	-	-	-	9,862,274,038.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,862,274,038.00
71	Provinsi Lampung	39,449,096,141.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,449,096,141.00
72	Kab. Lampung Barat	19,724,548,075.00	-	14,793,411,056.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,517,959,131.00
73	Kab. Lampung Utara	25,543,289,757.00	6,706,346,346.00	-	-	-	-	-	-	-	986,227,404.00	-	-	-	-	-	33,235,863,507.00
74	Kota Bandar Lampung	29,586,822,112.00	-	-	4,931,137,019.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,517,959,132.00
75	Kota Metro	34,517,959,132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,517,959,132.00
76	Kab. Tanggamus	24,655,685,094.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,655,685,094.00
77	Kab. Pringsewu	14,793,411,056.00	14,793,411,056.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,586,822,112.00
78	Kab. Mesuji	14,793,411,056.00	14,793,411,056.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,586,822,112.00
79	Kab. Lampung Tengah	-	-	-	4,931,137,019.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,931,137,019.00
80	Provinsi Jawa Barat	-	-	-	25,316,457,454.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,316,457,454.00
81	Kab. Bandung Barat	4,931,137,019.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,931,137,019.00
82	Kab. Indramayu	24,655,685,094.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,655,685,094.00
83	Kab. Kuningan	9,862,274,038.00	4,931,137,019.00	4,931,137,019.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,724,548,076.00
84	Kab. Majalengka	23,274,966,729.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,274,966,729.00
85	Kab. Tasikmalaya	24,655,685,094.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,655,685,094.00
86	Kota Tasikmalaya	14,793,411,056.00	4,931,137,019.00	-	-	-	-	-	-	4,931,137,019.00	-	-	-	-	-	-	24,384,472,558.00
87	Kab. Cianjur	24,384,472,558.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,384,472,558.00
88	Kota Tangerang Selatan	19,724,548,075.00	-	-	4,931,137,019.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,655,685,094.00
89	Kab. Banjarnegara	-	-	4,931,137,019.00	4,931,137,019.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,862,274,038.00
90	Kab. Pati	-	6,903,591,826.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,903,591,826.00
91	Kab. Sragen	9,369,160,336.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,369,160,336.00
92	Kab. Wonosobo	24,655,685,094.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,655,685,094.00
93	Kab. Wonogiri	24,655,685,094.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,655,685,094.00
94	Kota Tegal	-	-	-	9,689,684,242.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,689,684,242.00
95	Kab. Salatiga	24,655,685,094.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,655,685,094.00
96	Kab. Brebes	-	-	-	19,724,548,075.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,724,548,075.00
97	Kab. Magelang	-	-	-	2,958,682,211.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,958,682,211.00
98	Kab. Karang Anyar	-	-	-	-	-	15,286,524,758.00	-	4,438,023,317.00	-	-	-	-	-	-	-	19,724,548,075.00
99	Kota Surakarta	-	-	-	-	-	14,793,411,056.00	-	14,793,411,056.00	-	-	-	-	-	-	-	29,586,822,112.00
100	Kab. Boyolali	19,724,548,075.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,724,548,075.00
101	Kab. Demak	14,793,411,056.00	9,862,274,038.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,655,685,094.00
102	Kab. Semarang	-	-	-	2,958,682,211.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,958,682,211.00
103	Kab. Bantul	5,917,364,423.00	-	-	-	3,944,909,615.00	-	-	14,793,411,056.00	-	-	-	-	-	-	-	24,655,685,094.00
104	Kab. Bilar	24,655,685,094.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,655,685,094.00
105	Kab. Bendowoso	9,862,274,038.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,862,274,038.00
106	Kota Madiun	4,931,137,019.00	19,724,548,075.00	-	9,862,274,038.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,517,959,132.00
107	Kab. Madiun	4,931,137,019.00	19,724,548,075.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,655,685,094.00
108	Kab. Sidoarjo	-	-	-	14,793,411,056.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,793,411,056.00
109	Kab. Tulungagung	24,655,685,094.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,655,685,094.00
110	Kota Bilar	9,862,274,038.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,862,274,038.00
111	Kota Probolinggo	4,931,137,019.00	-	-	986,227,404.00	-	3,944,909,615.00	1,972,454,808.00	4,931,137,019.00	-	2,958,682,211.00	4,931,137,019.00	-	-	-	-	24,655,685,095.00
112	Kab. Jember	23,349,920,011.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,349,920,011.00
113	Kota Malang	7,396,705,528.00	-	-	7,396,705,528.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,931,137,019.00	-	-	19,724,548,075.00
114	Provinsi Kalimantan Barat	-	39,449,096,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,449,096,150.00
115	Kab. Landak	24,655,685,094.00	-	-	9,862,274,038.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,517,959,132.00
116	Kab. Kapuas Hulu	23,669,457,690.00	10,848,501,441.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,517,959,131.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	NAMA DAERAH	BIDANG											JUMLAH		
		INFRASTRUKTUR			KESEHATAN	PERTANIAN/ PERKEBUNGAN	PERHUBUNGAN/ TRANSPORTASI	PERDAGANGAN	PRASARANA PEMERINTAH DAERAH	SARANA DAN PRASARANA PEDESAAN	PASAR (termasuk pasar tradisional)	KELAUTAN DAN PERIKANAN (termasuk reklamasi pantai)		LINGKUNGAN HIDUP	
		JALAN DAN JEMBATAN	IRIGASI/ NORMALISASI SUNGAI ATAU PANTAI	AIR BERSIH											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.697.002.882.00
175	Kab. Bantaeng	14.793.411.056.00	3.944.909.615.00	-	-	-	-	2.958.682.211.00	-	-	-	-	-	-	34.517.959.132.00
176	Kab. Barru	24.655.685.094.00	-	5.917.364.423.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.517.959.132.00
177	Kab. Enrekang	6.903.591.826.00	-	23.669.457.690.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.517.959.132.00
178	Kab. Gowa	34.517.959.132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.517.959.132.00
179	Kab. Jeneponto	18.738.320.671.00	5.917.364.423.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.517.959.132.00
180	Kab. Luwu Utara	24.655.685.094.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.093.881.348.00
181	Kab. Pangkajene Kepulauan	24.655.685.094.00	4.931.137.019.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.517.959.132.00
182	Kab. Pinrang	34.093.881.348.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.570.160.009.00
183	Kab. Sinjai	9.862.274.038.00	-	9.862.274.038.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.517.959.132.00
184	Kab. Soppeng	24.655.685.094.00	-	2.983.337.896.00	-	-	-	-	-	-	9.862.274.038.00	-	-	-	19.724.548.075.00
185	Kab. Takalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.517.959.132.00
186	Kab. Tana Toraja	19.724.548.075.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.517.959.132.00
187	Kota Pare-pare	17.258.979.566.00	17.258.979.566.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.862.274.038.00
188	Kota Makassar	34.517.959.132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.101.701.992.00
189	Kota Palopo	-	-	-	9.862.274.038.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.093.881.348.00
190	Kab. Luwu Timur	13.728.285.460.00	-	9.689.684.242.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.496.867.894.00
191	Kab. Sidenreng Rappang	19.300.470.292.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.517.959.132.00
192	Kab. Luwu	8.703.456.838.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.517.959.132.00
193	Kab. Wajo	24.655.685.094.00	4.931.137.019.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.586.822.113.00
194	Kab. Toraja Utara	19.724.548.075.00	4.931.137.019.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.931.137.019.00
195	Kab. Bulu Kumba	29.586.822.113.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.449.096.150.00
196	Kab. Bone	4.931.137.019.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.517.959.131.00
197	Provinsi Sulawesi Barat	-	22.683.230.286.00	-	16.765.865.864.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.517.959.131.00
198	Kab. Majene	19.724.548.075.00	-	-	14.793.411.056.00	-	-	-	-	-	19.724.548.075.00	-	-	-	31.559.276.921.00
199	Kab. Mamuju	-	-	-	14.793.411.056.00	-	-	4.931.137.019.00	-	-	-	-	-	-	34.517.959.131.00
200	Kab. Polewali Mandar	9.862.274.038.00	-	6.903.591.826.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.517.959.132.00
201	Kab. Mamasa	19.724.548.075.00	-	-	14.793.411.056.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.586.822.113.00
202	Kab. Mamuju Utara	-	24.655.685.094.00	-	9.862.274.038.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.066.163.218.00
203	Kab. Buton Utara	17.258.979.566.00	7.396.705.528.00	4.931.137.019.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.517.959.132.00
204	Kab. Kolaka	31.056.163.218.00	-	-	-	-	-	-	-	1.885.370.928.00	-	-	-	-	34.517.959.132.00
205	Kab. Muja	29.490.482.489.00	-	1.571.045.461.00	314.212.051.00	1.256.848.203.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.851.218.012.00
206	Kab. Konawe Selatan	-	-	-	3.851.218.012.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.517.959.132.00
207	Kab. Wakatobi	-	-	-	4.931.137.019.00	-	29.586.822.113.00	-	-	-	-	-	-	-	4.931.137.019.00
208	Kab. Kolaka Utara	4.931.137.019.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.241.815.459.00
209	Kota Kendari	24.655.685.094.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.586.130.365.00	-	-	-	22.683.230.286.00
210	Kab. Buton	22.683.230.286.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.931.137.019.00
211	Kab. Badung	4.931.137.019.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.517.959.132.00
212	Kab. Giamyar	22.190.116.585.00	9.862.274.038.00	-	2.465.568.509.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.655.685.094.00
213	Kab. Karangasem	24.655.685.094.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.862.274.038.00
214	Kab. Tabanan	-	-	-	9.862.274.038.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.655.685.094.00
215	Kab. Bangli	17.258.979.566.00	7.396.705.528.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.517.959.132.00
216	Kab. Bima	34.517.959.132.00	-	-	-	-	-	9.862.274.038.00	-	-	-	-	-	-	14.793.411.057.00
217	Kota Bima	4.931.137.019.00	-	-	-	-	-	-	16.765.865.864.00	-	-	-	-	-	16.765.865.864.00
218	Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	-	4.931.137.019.00	9.862.274.038.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.793.411.057.00
219	Kab. Lembata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.093.881.348.00
220	Kab. Manggarai	34.093.881.348.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.517.959.132.00
221	Kab. Ngada	34.517.959.132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.517.959.132.00
222	Kab. Sikka	8.876.046.634.00	4.931.137.019.00	8.876.046.634.00	6.903.591.826.00	-	-	-	4.931.137.019.00	-	-	-	-	-	4.931.137.019.00
223	Kab. Timor Tengah Selatan	4.931.137.019.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.225.655.359.00
224	Kab. Timor Tengah Utara	23.225.655.359.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.793.411.056.00
225	Kota Kupang	2.958.682.211.00	6.903.591.826.00	-	-	-	1.479.341.106.00	3.451.795.913.00	-	-	-	-	-	-	34.517.959.131.00
226	Kab. Nagekeo	14.793.411.056.00	3.944.909.615.00	10.848.501.441.00	4.931.137.019.00	-	-	-	4.931.137.019.00	-	-	-	-	-	34.517.959.131.00
227	Kab. Manggarai Timur	22.683.230.286.00	-	-	6.903.591.826.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.724.548.076.00
228	Kab. Manggarai Barat	9.862.274.038.00	9.862.274.038.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.862.274.038.00
229	Kab. Ende	-	-	-	9.862.274.038.00	-	-	-	4.931.137.019.00	-	-	-	-	-	34.517.959.132.00
230	Kab. Sumba Tengah	19.724.548.075.00	-	9.862.274.038.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.931.137.019.00
231	Kab. Rote Ndao	-	4.931.137.019.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.449.096.151.00
232	Provinsi Maluku	34.517.959.132.00	4.931.137.019.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.449.096.151.00

(Rupiah)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 118 /PMK.07/2010 TENTANG
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA
PENGUATAN DESENTRALISASI FISKAL
DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini Gubernur/Bupati/Walikota*)
Provinsi/Kabupaten/Kota (diisi nama daerah) menyatakan telah mencantumkan
Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun
Anggaran 2010 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 atau
akan mencantumkannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun
Anggaran 2010 dan segera melaksanakan kegiatan setelah menerima transfer.

Terlampir disampaikan jadwal (*time schedule*) rencana penyelesaian atas kegiatan yang
pendanaannya bersumber dari Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan
Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2010.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran Tahap I
Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun
Anggaran 2010.

Tempat, tanggal, bulan, tahun

Gubernur/Bupati/Walikota

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota *).....

(Cap dan tanda tangan)

(materai Rp.6000,-)

Nama

*) Coret yang tidak perlu

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

u.b.

Pj. Kepala Bagian T.U.



Adelina Sirait

NIP 196606031987032001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 118 /PMK.07/2010 TENTANG
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA
PENGUATAN DESENTRALISASI FISKAL
DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

Jadwal Rencana Penyelesaian Kegiatan
Provinsi/Kabupaten/Kota ¹⁾:(diisi nama daerah)

No.	Kegiatan	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Pembuatan Surat Pernyataan	²⁾							
2	Pencairan Tahap I								
3	Pelaksanaan Kegiatan Tahap I								
4	Pelaporan Penyelesaian Tahap I								
5	Pencairan Tahap II								
6	Pelaksanaan Kegiatan Tahap II								
7	Pelaporan Penyelesaian Tahap II								
8	Pencairan Tahap III								
9	Pelaksanaan Kegiatan Tahap III								
10	Pelaporan Final Kegiatan								

Keterangan:

- 1) Coret yang tidak perlu
- 2) Beri Tanda (√)

Tempat, tanggal, bulan, tahun
Gubernur/Bupati/Walikota
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ¹⁾.....

(Cap dan tanda tangan)
(materai Rp.6000,-)
Nama

Salinan sesuai dengan aslinya

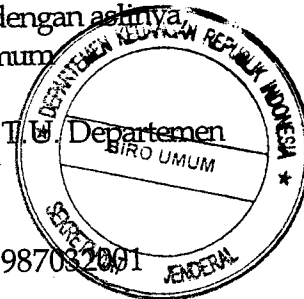
Kepala Biro Umum

u.b.

Pi. Kepala Bagian II

Adelina Sirait

NIP 196606031987032001



MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D. W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 118 /PMK.07/2010 TENTANG
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA
PENGUATAN DESENTRALISASI FISKAL
DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA PENGUATAN DESENTRALISASI
FISKAL DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

Provinsi/Kabupaten/Kota: ¹⁾
Perda APBD Nomor Tanggal

Bidang ²⁾	Pagu ²⁾
1.
2.
3. dst.
Total Pagu

Tanggal ³⁾	Tahap	Sisa Tahap Sebelumnya	Penerimaan dari Kas Umum Negara	Total	Ralisasi pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah (melalui SP2D Daerah) ⁴⁾	Sisa DPDF dan PPD di Rekening Kas Umum Daerah	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 = 2 + 4	6	7 = 5 - 6	8 = (7/5) x 100%
	Tahap I	-		-			
	Tahap II			-			
	Tahap III			-			
	Total						

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Gubernur/ Bupati/ Walikota¹⁾

(cap dan tanda tangan)
(materai 6000,-)

Nama

Keterangan:

- 1) Coret yang tidak Perlu
- 2) Diisi Sesuai dengan Alokasi dalam Lampiran I
- 3) Diisi tanggal diterima di Rekening Kas Umum Daerah
- 4) Minimal 90% dari dana Alokasi DPDF dan PPD Tahun 2010 yang ada di Rekening Kas Umum Daerah

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Pj. Kepala Bagian T.U. Desentralisasi

Adelina Sirait
NIP 196606031987032001

